

**SKRIPSI**  
**PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN PERSEKUTUAN**  
**KOMANDITER (*COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP*) PASKA PERATURAN**  
**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 17 TAHUN 2018**  
**TENTANG PENDAFTARAN PERSEKUTUAN KOMANDITER, PERSEKUTUAN**  
**FIRMA DAN PERSEKUTUAN PERDATA**



**Diajukan oleh:**  
**Teruna Tunjung Putera**

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| <b>NPM</b>                | <b>: 160512437</b>                |
| <b>Program Studi</b>      | <b>: Ilmu Hukum</b>               |
| <b>Program Kekhususan</b> | <b>: Hukum Ekonomi dan Bisnis</b> |

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**  
**2021**

**HALAMAN PERSETUJUAN**  
**SKRIPSI**  
**PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN PERSEKUTUAN**  
**KOMANDITER (*COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP*) PASKA PERATURAN**  
**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 17 TAHUN 2018**  
**TENTANG PENDAFTARAN PERSEKUTUAN KOMANDITER, PERSEKUTUAN**  
**FIRMA, DAN PERSEKUTUAN PERDATA**



**Diajukan oleh:**  
**Teruna Tunjung Putera**

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| <b>NPM</b>                | <b>: 160512437</b>                |
| <b>Program Studi</b>      | <b>: Ilmu Hukum</b>               |
| <b>Program Kekhususan</b> | <b>: Hukum Ekonomi dan Bisnis</b> |

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing**

**Pada Tanggal 06 Februari 2021**

**Dosen Pembimbing,**

**Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum**

**Mengetahui**

**Dekan,**



**Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum**

## HALAMAN PENGESAHAN

### SKRIPSI

# PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN PERSEKUTUAN KOMANDITER (*COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP*) PASKA PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 17 TAHUN 2018 TENTANG PENDAFTARAN PERSEKUTUAN KOMANDITER, PERSEKUTUAN FIRMA, DAN PERSEKUTUAN PERDATA



Penulisan skripsi ini telah dipertahankan di hadapan tim penguji ujian  
Penulisan Hukum/Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada :

**Hari** : Kamis  
**Tanggal** : 17 Juni 2021  
**Tempat** : Zoom Meeting

#### Susunan Tim Penguji:

**Ketua** : Dr.Y.Sari Murti Widiyastuti,S.H.,M.Hum  
**Sekretaris** : Puspaningtyas Panglipujati,S.H.,LL.M  
**Anggota** : Dr.ST. Mahendra Soni Indriyo,S.H.,M.Hum

#### Tanda Tangan

**Mengetahui,**  
**Dekan Fakultas Hukum**  
**Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

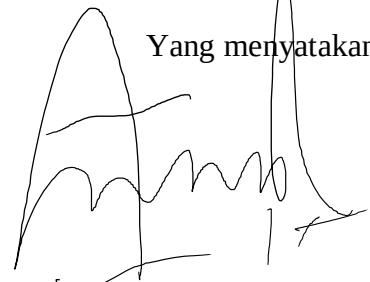
  
Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penulisan hukum/skripsi ini merupakan hasil karya asli dari penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi karya orang lain. Jika dikemudian hari penulisan hukum/skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya orang lain, maka penulis siap dan bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi pada ketentuan hukum yang berlaku.

Samarinda, 21 Mei 2021

Yang menyatakan,

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long vertical stroke on the right side.

Teruna Tunjung Putera

## **MOTTO**

Seorang pemikir melihat tindakannya sendiri sebagai eksperimen dan pertanyaan - sebagai upaya untuk menemukan sesuatu. Keberhasilan dan kegagalan baginya adalah jawaban di atas segalanya. - Frederich Nietzsche.

Dua hal yang membangkitkan ketakjuban saya: langit bertaburkan bintang di atas dan hukum moral di dalam diri saya. - Immanuel Kant.

## KATA PENGANTAR

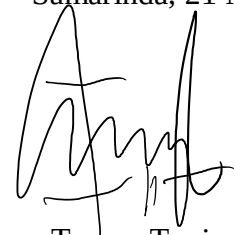
Segala Puji dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunianya kepada penulis sampai saat ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi dengan judul “***PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN PERSEKUTUAN KOMANDITER (COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP) PASKA PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 17 TAHUN 2018 TENTANG PENDAFTARAN PERSEKUTUAN KOMANDITER, PERSEKUTUAN FIRMA, DAN PERSEKUTUAN PERDATA***”, yang merupakan permasalahan hukum terkait dengan dampak diundangkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata. Penulisan Hukum/Skripsi ini juga sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Penulis menyadari bahwa Penulisan Hukum/Skripsi ini tidak dapat selesai apabila tanpa bantuan dan dukungan serta doa dari semua pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak berperan baik secara langsung maupun tidak langsung. Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dan sekaligus sebagai Dosen pembimbing saya yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk membantu dan membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Notaris Wawan Sjahrane, S.H., M.Kn. dan Notaris Paulus Adam, S.H. M.Kn, Kementrian Hukum dan Ham Provinsi Kalimantan Timur, Pengadilan Negeri Kota Samarinda beserta seluruh pihak yang terlibat dalam wawancara yang ditujukan untuk melengkapi penelitian skripsi ini.
3. Orang tua dan adik saya yang selalu mendoakan saya.
4. Dosen wali saya, ibu Anny Retnowati, SH. M.Hum yang telah membimbing saya selama masa perkuliahan.
5. Bapak dan ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah mendidik dan memberi ilmu.
6. Kepala Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta beserta staff yang telah memberi pelayanan pengurusan administrasi.

7. Dosen-dosen yang bersedia untuk menguji skripsi saya.
8. Teman-teman di lingkungan sivitas akademika Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
9. Teman-teman yang saya kenal yang selalu mendukung saya dalam penulisan skripsi, Medellin Family, FOPP D.I.Yogyakarta, Angelica Verendina S.E Sonu Mahadev, David Immanuel S.H, Gabriel Darda, Hersal Daffa, Nadiya Galang, Anya Paramitha S.H, Rizki Isrofani, Mas Adrian, Mas Slamet dan seluruh teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa apa yang penulis tulis tidak terlepas dari segala kekurangan dan kesalahan. Penulis mohon kepada pembaca untuk memberi kritik dan saran kepada penulis agar kedepannya, penulis dapat menulis penulisan hukum lebih baik. Demikian penulisan skripsi ini yang disusun oleh penulis. Akhir kata, semoga skripsi ini berguna bagi seluruh pihak yang membaca

Samarinda, 21 Mei 2021



Penulis,

Teruna Tunjung Putera

## ABSTRAK

*Indonesian business world has two types of businesses that are differentiate to become a legal entity and non-legal entity. The Commanditaire Venootshcap or limited partnership is established as a non-legal entity business model. The establishment of it as a non-legal entity could be seen through its characteristic and its legal basis from the Article 19 Indonesian Commercial Law Code (KUHD). Consider the limited partnership's submission could be done to a Notary as a state official, the Indonesian Ministry of Law and Human Right decided to make rule and published Ministerial Regulation No. 17/ 2018 About The Submission of Limited Partnership, Company Fellowship, and Civil Fellowship. Based on the new rule, the new issue discovered on the Notary as their duty on updating the limited partnership's deed and it was noted at the Article 23 of the Ministerial Regulation No. 17/2018. It also affected the missing deed that needs stamps and the consequences on the expired registered deed at the local court. This legal research is an empirical research. Based on this research, researcher implied the emptiness that exist on the Ministerial Regulation and it has no solution to fulfill the related issues, either to go back to the KUHD or update the Ministerial Regulation itself.*

**Keywords:** Ministry of Law and Human Rights, Public Notary, Company Fellowship, Local Court, Deed.

## DAFTAR ISI

|                                                            |      |
|------------------------------------------------------------|------|
| SKRIPSI.....                                               | i    |
| HALAMAN PERSETUJUAN.....                                   | ii   |
| HALAMAN PENGESAHAN.....                                    | iii  |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....                             | iv   |
| MOTTO.....                                                 | v    |
| KATA PENGANTAR.....                                        | vi   |
| ABSTRAK.....                                               | viii |
| DAFTAR ISI.....                                            | ix   |
| DAFTAR GAMBAR DAN LAMPIRAN.....                            | viii |
| BAB I PENDAHULUAN.....                                     | 1    |
| 1.1.Latar Belakang Masalah.....                            | 1    |
| 1.2. Rumusan Masalah.....                                  | 9    |
| 1.3. Tujuan Penelitian .....                               | 10   |
| 1.4. Manfaat Penelitian .....                              | 11   |
| 1.5. Keaslian Penelitian .....                             | 12   |
| 1.6. Batasan Konsep .....                                  | 20   |
| 1.7. Metode Penelitian .....                               | 24   |
| BAB II PEMBAHASAN.....                                     | 28   |
| 2.1. Tinjauan Umum tentang Persekutuan Komanditer.....     | 28   |
| 2.2. Tinjauan Umum Tentang Jabatan Notaris.....            | 36   |
| 2.3. Hubungan Antara Jabatan Notaris dan Pendirian CV..... | 51   |
| BAB III PENUTUP.....                                       | 63   |
| 3.1. Kesimpulan.....                                       | 63   |
| 3.2. Saran .....                                           | 64   |
| DAFTAR PUSTAKA .....                                       | 65   |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN .....                                    | 69   |

## DAFTAR GAMBAR

**Gambar 1.1:**

Bagan Pendirian CV sebelum diundangkannya Permenkumham 17/2018.....30

**Gambar 1.2:**

Bagan Pendirian CV setelah diundangkannya Permenkumham 17/2018.....32

## DAFTAR LAMPIRAN

### **Lampiran 1:**

Surat riset kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia.....73

### **Lampiran 2:**

Surat riset Notaris Paulus Adam, S.H.,M.Kn.....74

### **Lampiran 3:**

Surat Riset Pengadilan Kota Samarinda.....75

### **Lampiran 4:**

Surat riset Ketua Pimpinan Wilayah INI Kota Samarinda Wawan Syahranie,S.H.,M.Kn.....76